



## **DUGON TERTAWA**

(PERLINDUNGAN OLEH NELAYAN BIOTA LAUT  
PERAIRAN LEMBATA DI TELUK HADAKEWA)

### **Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (BARAKAT)**



LAPORAN AKHIR PROGRAM

Periode : Pebruari 2016 – Maret 2017

## I. INFORMASI PROGRAM

Wilayah Pendanaan	:	Kabupaten Lembata (Desa Lamatokan, Dikesare, dan Tapolangun).
KBA	:	Perairan Lembata (IDN 311)
Strategic Direction(s)	:	Pengelolaan SDA Pesisir dan Laut Berbasis Masyarakat
Nama Proyek	:	DUGON TERTAWA (Perlindungan oleh Nelayan Biota Laut Perairan Lembata di Teluk Hadakewa)
Nomor Laporan	:	02
Periode waktu	:	Pebruari 2016 –Maret 2017 (14 bulan)
Disampaikan oleh	:	Benediktus Bedil (Koordinator Program)
Tanggal	:	20 Juni 2017
Hibah CEPF		
a) Dalam USD	:	USD 19,681.15
b) Dalam Mata Uang Lokal (Rp)	:	Rp. 255.855.000
Kontribusi Mitra		
a) Peralatan Kerja	:	Rp. 6.775.000
b) Staf : Staf Sekretariat dan Staf Keuangan Mikro	:	Rp. 45.000.000
c) Staf Program selama periode NCE(Koordinator Program dan Finance)	:	Rp. 8.700.000
Kontribusi donor lain (BNP2TKI melalui BP3TKI dalam bentuk Bimbingan Tekhnis)	:	Rp. 11.000.000
Periode program:	:	1 Pebruari 2016 – 31 Maret 2017
Lembaga pelaksana (mitra):	:	Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (BARAKAT)

## II. RINGKASAN

Implementasi program DUGON TERTAWA (Perlindungan oleh Nelayan Biota Laut Perairan Lembata di Teluk Hadakewa) memperlihatkan hasil yang memadai jika dilihat dari outcome proyek dan indikator yang direncanakan. Meski demikian proses untuk mencapai outcome tersebut membutuhkan tambahan beberapa kegiatan yang berdampak pada penambahan waktu dan ikut mempengaruhi periode proyek dari 12 bulan hingga 14 bulan.

Dalam mencapai output proyek “Terbentuknya Daerah Perlindungan Laut” dibutuhkan proses yang panjang menuju “Kesepakatan Adat Daerah Perlindungan Laut antara lain Pemetaan Digital yang harus dilakukan selain untuk melengkapi pemetaan partisipatif juga untuk memastikan luas Daerah Perlindungan Laut. Pertemuan Tim Khusus untuk Perumusan Draft yang semula direncanakan 1 kali berjalan hingga 3 kali sebelum Konsultasi Publik. Selain itu 2 pertemuan yang dirancang khusus untuk memperkuat draft kesepakatan yaitu pertemuan multipihak dan pertemuan para ketua suku.

Sementara berkaitan dengan “terbangunnya kapasitas lokal untuk perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan” telah dilakukan sosialisasi maupun dan pertemuan berkali-kali dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan nelayan agar menjadi nelayan pembudidaya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam perburuan, memanfaatkan potensi lokal yang ada di darat untuk membangun ketahanan ekonomi rumah tangganya, dan membentuk kelompok pengawas untuk mengawasi tindakan-tindakan yang merugikan.

Alhasil, terbentuknya Daerah Perlindungan Laut pada 7 area kritis yang disebut “muro” seluas 549.5 ha yang diproses bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata serta disepakati oleh 97 % masyarakat melalui Kesepakatan Adat. Selain itu, ada 8 kelompok satwa yang dilindungi secara total melalui kesepakatan termasuk kesepakatan 96 % masyarakat untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan. Berkaitan dengan upaya untuk mengurangi resiko ekonomi rumah tangga pada nelayan yang selama ini mengandalkan sumber pendapatan dari laut; dilakukan pendampingan untuk pengelolaan rumah apung, pemasaran aneka produk pangan yang dihasilkan nelayan, pendampingan usaha bersama simpan pinjam, dan pengembangan mebel bambu. Dengan input tersebut, terdapat 34 orang anggota nelayan (59%) memiliki 1 jenis usaha baru dengan peningkatan pendapatan rata-rata mencapai 7 %.

Di penghujung kegiatan dan menjelang pelaksanaan kesepakatan adat; terjadi perubahan kewenangan pada urusan kelautan yang sebelumnya menjadi tupoksi Kabupaten dipindahkan ke Pemerintah Propinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur). Hal ini cukup menyulitkan kegiatan koordinasi dan kerjasama menyelenggarakan Kesepakatan Adat tersebut. Barakat menyikapi hal ini dengan melakukan konsultasi dan koordinasi langsung ke Kupang yaitu ke Dinas Kelautan Propinsi Nusa Tenggara Timur hingga akhirnya dapat mengukuhkan kesepakatan Daerah Perlindungan Laut ini melalui Ritual Adat.

Melalui proyek ini 549,5 ha kawasan laut sepakat untuk dilindungi dan dengan demikian ancaman terhadap jenis satwa laut yang dilindungi seperti dugon dan penyau tidak ada lagi.

### III. CAPAIAN

#### A. Objective :

*Ancaman terhadap KBA Laut Perairan Lembata di Teluk Hadakewa berkurang*

#### **Indikator:**

1. 70 % nelayan di 3 desa sasaran proyek menjaga Wilayah Perlindungan Laut Desa melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dalam perburuan dan pengambilan biota laut .
2. 90 % satwa laut terancam punah di 30 ha KBA Perairan Lembata di Teluk Hadakewa diawasi masyarakat 3 Desa.
3. 50 % anggota kelompok usaha produktif memiliki minimal 1 usaha baru yang memberikan pendapatan tambahan sebesar 10 %.

#### **Capaian:**

1. 97 % masyarakat di 3 desa sepakat menetapkan perlindungan kawasan DPL Teluk Hadakewa melalui Kesepakatan Adat dan 96% masyarakat sudah menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. 549.5 ha kawasan laut dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan melalui penetapan DPL.
2. 8 kelompok satwa (Duyung, Penyu, Pari Manta, Ikan Napoleon, Ikan Lumba-lumba, Terumbu Karang, Bakau, dan Kuda Laut) disepakati sebagai jenis yang dilindungi secara total atau mencakupi 207 jenis dari 224 jenis terancam punah yang teridentifikasi atau sebesar 92% dari jumlah GTS diawasi oleh masyarakat yang ada di perairan lembata melalui kesepakatan adat.
3. 34 orang dari total 43 anggota kelompok nelayan (59 %) memiliki 1 jenis usaha baru dengan peningkatan pendapatan rata-rata mencapai 7 %

#### **Indikator 1 dan 2 dipenuhi melalui Penetapan Daerah Perlindungan Laut.**

Penetapan Daerah Perlindungan Laut di Teluk Hadakewa dilakukan melalui kesepakatan yang ditetapkan bersama 511 kepala keluarga atau 97 % masyarakat dari 528 kepala keluarga yang ada di 3 desa dikukuhkan melalui ritual adat agar memiliki sanksi adat di Desa Lamatoka – Kecamatan Ile Ape Timur pada 30 Januari 2017 dan ditandatangani bersama oleh

- 3 orang Ketua Lembaga Adat (Ketua Lembaga Adat Desa Dikesare, Ketua Lembaga Adat Desa Tapolangun, dan Ketua Lembaga Adat Desa Lamatoka),
- 13 Kepala Desa dari 14 Kepala Desa yang desa-desanya ada di pesisir pantai Teluk Hadakewa (Kepala Desa Lamatoka, Kepala Desa Lamawolo, Kepala Desa Jontona, Kepala Desa Todanara, Kepala Desa Baopana, Kepala Desa Lamatuka, Kepala Desa Merdeka, Kepala Desa Lerahinga, Kepala Desa Waienga, Kepala Desa Tapobaran, Kepala Desa Tapolangun),
- Lembaga Pendamping dan Funding (Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata/BARAKAT dan Team Leader RIT CEPF – Wallacea Burung Indonesia),
- Pemerintah Daerah (Penjabat Bupati Lembata dan Gubernur Nusa Tenggara Timur).

#### **Indikator 3 dipenuhi melalui Pembangunan Kesepakatan Lokal untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan.**

Pembangunan Kesepakatan Lokal untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut secara berkelanjutan dilakukan dengan membentuk 3 Kelompok Bereket Lewa di masing-masing Desa pada tanggal 3 – 5 Agustus 2017 beranggotakan 44 orang yang diambil dari unsur Pemerintahan Desa, Kelompok-kelompok kategorial dan kelompok-kelompok Usaha yang ada di desa seperti Kelompok Karang Taruna, Kelompok Buruh Migran, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga, Kelompok dan Nelayan. Kelompok-kelompok tersebut didampingi agar memiliki infrastruktur yang memadai (usaha yang didahului dengan pelatihan dan pendampingan) untuk menjalankan pengawasan yang efektif atas Daerah Perlindungan Laut yang sudah disepakati.

## **B. Output**

### **1. Output 1:**

***Terbentuknya Daerah Perlindungan Laut di Teluk Hadakewa melalui Kesepakatan Adat.***

#### **Indikator:**

1. 75 % Masyarakat 3 Desa Sasaran Proyek yang menyepakati batas dan luas Daerah Perlindungan Laut di Teluk Hadakewa setelah 6 bulan program berjalan.
2. Pemerintah Kabupaten Lembata yang diwakili oleh Dinas Kelautan dan Perikanan menyetujui Penetapan Wilayah Perlindungan Laut Desa yang sudah disepakati batas dan luasnya pada bulan ke 8 periode proyek.
3. Dokumen Kesepakatan yang sudah disepakati dikukuhkan menjadi acuan bagi 75 % masyarakat di 3 desa dalam mengelola Wilayah Perlindungan Laut Desa secara lestari dan berkelanjutan pada bulan ke 8

#### **Capaiannya:**

- 97 % Masyarakat 3 Desa Sasaran Proyek dan 10 desa di pesisir Teluk Hadakewa menyepakati batas dan luas Daerah Perlindungan Laut di Teluk Hadakewa pada bulan ke-12 periode proyek.
- Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Lembata yang diwakili oleh Penjabat Bupati Lembata menyetujui Penetapan Wilayah Perlindungan Laut Teluk Hadakewa meliputi 7 muro inti seluas 549,5 ha pada bulan ke 12 periode proyek.
- Dokumen Kesepakatan yang sudah disepakati melalui ritual adat dikukuhkan menjadi acuan tidak saja bagi 2,221 warga masyarakat di 3 desa sasaran proyek tetapi juga bagi 7.157 warga masyarakat di 10 desa lainnya dalam mengelola Wilayah Perlindungan Laut di Teluk Hadakewa secara lestari dan berkelanjutan.

Indikator di atas terpenuhi melalui beberapa aktivitas berikut :

▪ **Kajian dan Pemetaan Daerah Perlindungan Laut**

Kegiatan kajian dan pemetaan dimulai dengan FGD bersama 90 nelayan di masing-masing desa untuk mengidentifikasi satwa laut terancam punah di Teluk Hadakewa dan menyepakati draft peta desa kemudian dilanjutkan dengan pembuatan peta pada tanggal 27 April 2016 di desa Lamatoka dihadiri oleh 27 orang utusan dari 3 desa dan 1 staf DKP Lembata. Sketsa peta partisipatif ini kemudian disempurnakan melalui pemetaan digital yang dilakukan pada tanggal 22 Nopember 2016 yang dilakukan oleh Staf DKP didampingi oleh Staf Barakat dan Bereket Lewa. Pemetaan Digital dilakukan untuk memastikan luas dan batas DPL.

▪ **Merumuskan Kesepakatan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut**

Merumuskan kesepakatan dan pengelolaan DPL dimulai dengan lokakarya eksplorasi ide di Desa Lamatoka pada tanggal 19 Mei 2016 yang dihadiri oleh 32 orang yang terdiri dari Pemerintahan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Nelayan, Kelompok Kategorial lainnya, Dinas Kelautan & Perikanan, LSM Eco Floresta Lembata, dan Barakat; dilanjutkan dengan penyempurnaan draft oleh Tim Khusus yang terdiri dari perwakilan Pemerintah (DKP Kabupaten Lembata), perwakilan Barakat, dan perwakilan Komunitas sebanyak 3 kali (pada tanggal 08 September 2017 di Jembatan Titian Pelabuhan Lewoleba; pada tanggal 22 Nopember dan 15 Desember Di Tempat Pertemuan “J22” Lamahora – Lembata), pertemuan bersama Para Ketua Suku di masing-masing desa (Dikesare tanggal 27 September 2016, di Tapolangun tanggal 28 September 2016 dan di Lamatoka tanggal 15 Oktober 2016). Draft tersebut didiskusikan bersama para pihak dalam lokakarya yang dilakukan di hotel Lewoleba pada tanggal 21 Desember 2016 dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur Bereket Lewa, unsur Pokmaswas, unsur Tokoh Adat, Pemerintah Kabupaten (3 orang staf Pengawas DKP Lembata), Tim Pengawas Laut (Koramil dan Polair Lembata), dan Barakat. Kemudian dilanjutkan dengan konsultasi ke masyarakat melalui konsultasi publik ke 528 kk yang ada di 3 desa pada tanggal 11-18 Januari 2017.

▪ **Mengukuhkan Kesepakatan Pengelolaan DPL dengan Ritual Ada**

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Lamatoka pada tanggal 30 Januari 2017 didahului dengan Pertemuan Bersama Para Kepala Suku di 3 desa sasaran proyek untuk mendiskusikan sanksi adat terhadap pelanggaran dan diskusi tentang proses penyelenggaraan ritual adat bersama para pihak serta konsultasi dengan Pemerintah (DKP Propinsi dan Kabupaten) tentang dokumen kesepakatan. Pengukuhan ini melibatkan peserta antara lain : Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Lembata, Pemerintah Kecamatan dari 3 Kecamatan yaitu Ile Ape Timur, Ile Ape, dan Lebatukan, Pemerintah Desa dari 18 desa (4 desa adalah desa yang berada di luar Teluk Hadakewa), Utusan Desa yang terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, utusan kelompok-kelompok, dan pihak lain seperti LSM dan Wartawan

:

- **Melibatkan Pemerintah Dalam Kegiatan Proyek.**

Agar pemerintah dapat mengetahui sejak awal program perlindungan yang dilakukan; maka Barakat melibatkan pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata dalam beberapa kegiatan proyek yaitu Kegiatan Penyadartahuan, Kegiatan Pemetaan, Kegiatan Lokakarya Eksplorasi Ide, Perumusan Draft Kesepakatan DPL, Konsultasi Publik, dan Pengukuhan Kesepakatan.

- **Konsultasi dan Koordinasi.**

Konsultasi dan koordinasi juga sering dilakukan di setiap kesempatan pertemuan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur; baik secara tidak langsung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata yang mengetahui secara baik dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan proyek sejak dari awal maupun secara langsung ketika ada kunjungan supervisi dan monitoring Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT ke Lembata. Konsultasi dan koordinasi juga dilakukan langsung ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT di Kantor Kelautan dan Perikanan Propinsi NTT.

- **Summary Laporan untuk Pemerintah.**

Barakat juga mengirimkan surat undangan disertai summary laporan satu halaman berisikan capaian-capaian penting dan rencana-rencana yang diharapkan dihadiri oleh Pemerintah Propinsi.

- **Pendekatan dan Sosialisasi Awal Dengan Kepala Desa.**

Barakat melalui Staf Lapangan melakukan kunjungan ke 11 desa lain yang berada di pesisir Teluk Hadakewa bertemu Kepala Desa dan menjelaskan muatan proyek dan memberikan beberapa informasi penting tentang urgensi perlindungan spesies laut terancam punah di Teluk Hadakewa. Pertemuan tersebut diakhiri dengan pernyataan lisan Kepala Desa untuk mendukung upaya Perlindungan Spesies Laut di Teluk Hadakewa.

- **Melibatkan Kepala Desa dan Pokmaswas dalam Kegiatan Pembahasan Draft Kesepakatan.**

Sebagai tindaklanjut dari pertemuan bersama Kepala Desa, Kepala Desa dan Pokmaswas Desa diundang untuk mengikuti pertemuan pembahasan draft final Kesepakatan DPL sebelum dilakukan konsultasi publik ke masyarakat. Pada kesempatan tersebut, peserta yang berasal dari luar desa sasaran proyek diberi tugas untuk melakukan sosialisasi draft kesepakatan tersebut ke masyarakatnya masing-masing.

▪ **Penandatanganan Kesepakatan Adat dan Distribusi Dokumen**

Document kesepakatan Final yang telah dihasilkan secara partisipatif melalui pengukuhan adat ditandatangani juga oleh 10 Kepala Desa lainnya dan memiliki konsekwensi adat bagi masyarakat desanya. Selanjutnya dokumen yang telah disepakati didistribusikan ke 10 desa lainnya dan diumumkan ke semua masyarakat untuk diketahui dan ditaati.

**2. Output 2 :**

***“Terbangunnya Kapasitas Lokal untuk Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut secara Berkelanjutan”.***

**Indikator :**

1. 75 % masyarakat di 3 desa menggunakan teknologi perburuan dan pengambilan hasil laut yang ramah lingkungan.
2. Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Laut terbentuk dan berperan aktif pada bulan ke 7.
3. Minimal 50 % dari Nelayan Aktif memiliki minimal 1 jenis mata pencaharian alternatif.

**Capaiannya :**

- 96% masyarakat di 3 desa sudah menggunakan teknologi perburuan dan pengambilan hasil laut yang ramah lingkungan.
- 3 Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Laut yang disebut Bereket Lewa terbentuk dan berperan efektif.
- 18% masyarakat nelayan aktif sudah memiliki minimal 1 jenis mata pencaharian alternatif (3 dari 17 nelayan) dan 34 orang dari total 43 anggota kelompok nelayan (59 %) memiliki 1 jenis usaha baru dengan peningkatan pendapatan rata-rata mencapai 7 %.

Indikator di atas terpenuhi melalui beberapa aktivitas berikut :

▪ **Penyadartahuan.**

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi ke 3 desa sasaran proyek selain untuk memberikan informasi tentang satwa laut yang dilindungi juga untuk membangun kesadaran masyarakat tentang alasan untuk melindungi spesies di laut dan mengajak nelayan untuk menggunakan teknologi perburuan yang ramah lingkungan sebagai nelayan pembudidaya (bukan nelayan penangkap). Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama antara Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Lembata dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (BARAKAT) pada tanggal 29 – 31 Maret di 3 desa sasaran (Dikesare, Tapolangun, dan Lamatokan) dihadiri oleh 118 orang. Penyadaran juga selalu dilakukan di setiap pertemuan bersama baik dengan Barakat maupun dengan Burung Indonesia ketika ada kunjungan supervisi – monitoring.



- **Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Ramah Lingkungan.**

Pelatihan ini dilakukan melalui co-sharing dana antara Proyek Dugon Tertawa – CEPF dan Bimtek bagi Komunitas TKI – BNP2TKI. Melalui pelatihan ini, 25 orang peserta dari 3 desa sasaran proyek mendapat pengetahuan dan ketrampilan untuk membuat alat tangkap ramah lingkungan berupa rumah apung, nere, dan bubu serta pembuatan kursi meja bambu. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 18 – 23 April 2016 dilanjutkan dengan pendampingan ke peserta ketika tindaklanjut di masing-masing desa.

- **Pembentukan Kelompok.**

Setelah melewati kegiatan penyadaran dan mendiskusikan konsep kelompok Bereket Lewa, maka dilakukan pembentukan Kelompok Bereket Lewa di masing-masing desa dihadiri oleh 56 orang pada tanggal 3 – 5 Agustus 2016. Struktur organisasi kelompok terdiri dari Dewan Penasihat, Badan Pengurus dan Anggota. Keanggotaan Kelompok berjumlah 44 orang dengan perincian Dewan Penasihat 13 orang, Badan Pengurus 9 orang, dan Anggota 22 orang. Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk memberikan tugas kepada Bereket Lewa untuk menjalankan tugas menjaga, mengawasi, dan memelihara kelestarian lokasi dan spesies yang dilindungi dengan persetujuan masyarakat.

- **Pelatihan Monitoring dan Pendokumentasian Hasil serta Keparalegalan**

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan bagi Kelompok Pengawas Bereket Lewa agar bisa menjalankan tugas keparalegalan dalam pengawasan Daerah Perlindungan Laut dan melaporkan hasil pengawasannya secara sistemik. Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2017 dan melibatkan 23 orang peserta di desa Lamatoka.

- **Akses Bantuan Infrastruktur Monitoring dari Pemerintah.**

Akses bantuan dilakukan untuk mendapat dukungan sarana dan prasarana pengawasan bagi kelompok Bereket Lewa. Akses dilakukan dengan membuat sebuah proposal ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata dan konsultasi serta koordinasi dengan Dinas Kelautan & Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan tersebut, diperoleh bantuan berupa Satu Buah Perahu Motor dan peralatan monitoring berupa life jacket 30 buah, rompi 30 buah, kaus 30 helai, teropong kamera 3 buah, serta hp 3 buah.

- **Pemberdayaan Kelompok.**

Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas kelompok agar bisa menjalankan usaha kelompok dalam rangka mendukung anggotanya di Bereket Lewa melakukan tugasnya secara optimal dan efektif. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk **pelatihan Kewirausahaan** bagi 4 kelompok dengan jumlah peserta 75 orang. Materi

pelatihan yang diberikan adalah Manajemen Usaha Mikro, Kewirausahaan Sosial, Pembukuan Usaha, dan Bisnis Model Canvas.

Pemberdayaan juga dilakukan dalam bentuk **praktek Pembuatan Jamu Ternak, Pupuk MOL, Pangan Lokal dan Pengembangan Hortikultura Hemat Air** di Pekarangan yang dilakukan pada 1 kelompok dan diikuti oleh 21 orang perempuan kepala keluarga. Praktek juga dilakukan dalam bentuk **Pembuatan Kemasan Sekunder dan Mebel Bambu**. Praktek ini diikuti oleh 59 orang dari 3 kelompok usaha produktif.

**Alat Verifikasi** : Laporan Pemberdayaan dan Pendampingan Kelompok.

- **Pendampingan Kelompok.**

Pendampingan dilakukan untuk memperkuat dan membenahi kelompok di bidang organisasi, administrasi, permodalan, usaha produktif, dan akseptasi. Sasaran pendampingan adalah pada semua kelompok dengan bentuk penampingan berupa : Pendampingan administrasi Usaha Bersama Simpan Pinjam Kelompok; Fasilitasi pembuatan, pengemasan, pemasaran produk-produk kelompok, dan Pembukuan Usaha Kelompok; Pembenahan organisasi dan administrasi kelompok; dan Pendampingan dalam akses ke bantuan pihak lain.

#### IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas (tidak perlu diisi apabila program TIDAK menysasar pada Arahans Strategis 1)

<b>Nama Spesies Prioritas</b>	<b>Ancaman</b>	<b>Status</b>	<b>Dokumen verifikasi</b>
Dugon	Perburuan	Jumlah Populasi Dugon awal proyek 5 - 10 pasang. Hingga akhir proyek jumlah tersebut tetap(karena tidak ada yang menangkap spesies tersebut. Ancaman berkurang 100%.	Monitoring baseline dan endline
Penyu	Perburuan dan perdagangan	Jumlah Populasi Penyu Sisik 1-5 pasang dan penyu tempayan 30 – 50 pasang dan sekitar 1 – 2 ekor ditangkap dan diikat untuk dijual setiap bulan. Selama periode proyek, ada 1 ekor penyu tempayan yang terjaring pukat tanpa disengaja. Ancamannya menurun sebesar 97,5 %	Monitoring baseline dan endline

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

<b>Nama KBA</b>	<b>Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA</b>	<b>Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan</b>	<b>Dokumen Verifikasi</b>
KBA Perairan Lembata (IDN 311)	Perluasan KBA Perairan Lembata (yang belum dilindungi seluas 37.927 ha).	549,5 ha (0,14 %)	Peta Digital dan Laporan Kesepakatan Adat DPL, dan Dokumen CEPF-PFA7

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

<b>Nama Kawasan</b>	<b>Bentuk Perlindungan Kawasan</b>	<b>Luas Kawasan/Tahun Penetapan</b>	<b>Dokumen Verifikasi</b>
Teluk Hadakewa	Daerah Perlindungan Laut melalui Kesepakatan Adat	11.490,2 ha/2016	Peta Digital

4. Penerima manfaat

a. **Karakteristik penerima manfaat**

Nama Komunitas	Jenis Komunitas								Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners	Masyarakat hukum adat/komunitas lokal	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Komunitas Perkotaan	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa	
Komunitas Nelayan	v							v				
Komunitas Buruh Migran					v			v				
Masyarakat Pesisir			v								v	
Perempuan Kepala Keluarga								v				
Masyarakat Adat		v							v			

b. Jumlah penerima manfaat

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih		
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim		
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal	4.435	4.963

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan		
Peningkatan akses atas jasa lingkungan		
Pelatihan Kewirausahaan (Manajemen Usaha, Kewirausahaan Sosial, Bisnis Model Kanvas, Analisa Usaha), Jamu Ternak, MOL (Mikro Organisme Lokal), Pangan Lokal, Mebel Bambu, Monitoring dan Pendokumentasian Hasil.	65	64
Lain-lain		
<b>Total Penerima Manfaat</b>	<b>4.500</b>	<b>5.027</b>

#### 5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Kesepakatan Adat	Lokal	DPL Teluk Hadakewa	Peningkatan DPL menjadi Kawasan Konservasi Cadangan

### V. PEMBELAJARAN

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
Hasil : a. Perubahan pengetahuan b. Perubahan sikap c. Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan proses penyadaran yang dilakukan bersama beberapa pihak memberikan pengetahuan yang memadai bagi</li> </ul>	Dukungan Para Pihak	Turunnya ancaman terhadap jenis satwa laut yang dilindungi	Kerjasama antar pihak mesti dilakukan karena sasaran proyek pada masyarakat

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
<p>perilaku</p>	<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya pengawasan terhadap keamanan biota laut dilakukan karena kesadaran.</li> <li>• Masyarakat menyadari manfaat riil konservasi keragaman hayati terhadap kehidupan sehari-hari.</li> <li>• Pertemuan Para Ketua Suku ikut mempengaruhi perilaku masyarakat adat untuk DPL</li> <li>• Belum disediakan kerangka kerja yang cukup jelas untuk memandu kegiatan Bereket Lewa.</li> </ul>	<p>Keterlibatan SKPD (DKP)</p> <p>Dukungan Masyarakat</p> <p>Keterlibatan Tokoh Adat dan Tokoh Agama</p> <p>Pembentukan di Peng-hujung Pro-yek</p>	<p>Nelayan menjadi Pembudidaya</p> <p>97% masyarakat memberikan perlindungan terhadap spesies laut terancam punah di kawasan teluk Hadakewa.</p> <p>549.5 ha kawasan teluk hadakewa terlindungi dalam bentuk kesepakatan</p> <p>Bereket Lewa belum berperan optimal dalam menjalankan pengawasan DPL</p>	<p>yang sama.</p>

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
<p>Proses :</p> <p>a. Perencanaan</p> <p>b. Pelaksanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi rumah tangga tidak mencapai target yang direncanakan.</li> <li>•</li> </ul>	<p>Rencana tidak mempertimbangkan KSMD (Kalender Situasi Masyarakat Desa)</p>		<p>Dalam proses pembentukan DPL harus didahului dengan survey ekologi agar mendapatkan gambaran awal data jenis satwa laut yang lebih valid.</p> <p>Untuk rencana kerja peningkatan ekonomi masyarakat, perlu di dahului dengan kajian potensi desa, agar mendapatkan jenis usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di desa maupun permintaan pasar.</p>

## **VI. STATUS KEUANGAN**

- a. Pemasukan : Rp.255.855.000
- b. Pengeluaran : Rp. 255.855.000
- c. Saldo : Rp.0